

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu konsep yang banyak menarik perhatian para Ilmuwan Politik di negara demokrasi baru termasuk Indonesia adalah konsep *civil society*. Terjemahan istilah *civil society* dalam bahasa Indonesia masih beragam seperti, masyarakat madani,<sup>1</sup> masyarakat sipil,<sup>2</sup> masyarakat berbudaya<sup>3</sup> hingga masyarakat kewargaan<sup>4</sup>. Meskipun terdapat keragaman konsep namun *civil society* secara umum diartikan sebagai wilayah kehidupan sosial yang terletak di antara negara dan komunitas lokal tempat terhimpunnya kekuatan masyarakat untuk mempertahankan kebebasan, keanekaragaman, serta kemandirian masyarakat terhadap kekuasaan negara dan pemerintah.<sup>5</sup>

Sebagai sebuah konsep, *civil society* memiliki cikal bakal dari sejarah masyarakat Barat. Akar perkembangannya dapat dirunut mulai dari Cicero dan bahkan, menurut Manfred Riedel, lebih ke belakang lagi sejak Aristoteles. Faktanya, Cicero yang memulai

---

<sup>1</sup> Masyarakat madani dalam bahasa Inggris *civil society* dapat diartikan sebagai masyarakat yang beradab untuk membangun, memimpin, dan kehidupan memaknai. Masyarakat madani adalah istilah yang dilahirkan untuk menerjemahkan konsep di luar islami. Kata madani itu pertama kalinya diajukan oleh Anwar Ibrahim, mantan wakil perdana menteri Malaysia, dan di Indonesia dikembangkan oleh Nurcholish Madjid. <http://www.dosenpendidikan.com/>.

<sup>2</sup> Masyarakat sipil dipakai oleh Mansour Faqih dalam bukunya *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial, Pergolakan ideologi di LSM Indonesia* .1996.

<sup>3</sup> *Ibid*,-

<sup>4</sup> *Ibid*,-

<sup>5</sup> Bachtiar Alam. 1999. *Antropologi dan Civil Society: Pendekatan Teori Kebudayaan*. Jurnal Antropologi Indonesia vol.XXIII, no.60. Universitas Indonesia. Hal 3-10.

menggunakan istilah *societes civilis* dalam filsafat politiknya.<sup>6</sup> Pada paruh kedua abad ke-18, terminologi *civil society* memiliki penekanan terkait pemahaman yang lebih bercorak sosiologis, dimana Gramsci salah satunya melihat sebuah makna adanya sifat kemandirian dan politis dari konsep tersebut.<sup>7</sup>

Sementara di Indonesia, gagasan dan praksis *civil society* semakin berkembang dan kuat sejak tumbangnya era Orde Baru, sebagai respon terhadap pengelolaan politik oleh regim otoriter dan hegemonik, yang sering melakukan intervensi terhadap kelompok-kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat. Gagasan demokratisasi yang dilakukan dari atas negara sebagaimana diharapkan banyak kalangan, masih jauh dari harapan, bahkan peran negara justru semakin menguat melalui berbagai tindakan yang eksekutif terhadap kekuatan-kekuatan rakyat pro-demokrasi.

Ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat pada era Orde Baru, mendorong masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan dan melindungi kepentingan mereka terhadap pemerintahan otoriter dan sumber dayanya, memunculkan kekuatan arus bawah untuk melakukan perlawanan terhadap kelompok yang menguasai sebagian besar instrumen ekonomi, dan menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan pribadi. Gerakan ini dinamai gerakan reformasi. Masyarakat dengan sadar memahami, bahwa mereka adalah pelaku atau aktor dalam proses politik yang memiliki kemampuan tertentu untuk memahami dan bertindak atas setiap peristiwa yang ada di sekitarnya.<sup>8</sup>

Sejak reformasi 1998 dan keruntuhan regim otoriter di Indonesia pasca Orde Baru, terjadilah kebangkitan partisipasi masyarakat sipil. Dampaknya, banyak Asosiasi sipil bermunculan di aras lokal. Upaya mereka, umumnya ingin meningkatkan peran masyarakat

---

<sup>6</sup> Dalam tradisi Eropa abad ke-18, pengertian civil society dianggap sama dengan pengertian negara (the state), yakni suatu kelompok/kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok lain. Dikutip dalam Muhammad AS Hikam. 1996. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES. Hal 1.

<sup>7</sup> *Ibid.* Hal 3.

<sup>8</sup> Untuk mengikuti perdebatan mengenai agensi dan struktur, lihat A. Giddens, *The Constitution of Society*, Stanford CA, Stanford University Press, 1987, khususnya Bab 4 dan 9. Juga kritik E.P. Thompson terhadap strukturalisme dalam *The Poverty of Theory*, London: Merlin, 1978.

dalam setiap proses penyusunan kebijakan publik, baik itu menyangkut perencanaan pembangunan, penggaran daerah, sampai dengan pelayanan hak-hak sosial dasar.<sup>9</sup> Terlebih, bahwa proses pengambilan kebijakan publik sangat erat hubungannya dengan budaya politik, partisipasi politik, dan kelompok kepentingan. Suatu kebijakan publik yang pro rakyat, dalam semua tahapan prosesnya pasti memerlukan partisipasi masyarakat.<sup>10</sup>

Tuntutan akan terciptanya perluasan ruang publik bagi pergerakan *civil society* yang mandiri, membuat entitas ini melakukan penerobosan batas-batas kelas serta memiliki kapasitas politik yang cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan pengimbang (*balancing force*) dari kecenderungan-kecenderungan intervensionis negara, dan pada saat yang sama mampu melahirkan pula kekuatan kritis reflektif (*reflektif force*) di dalam masyarakat yang mencegah derajat konflik-konflik internal sebagai akibat dari proses formasi sosial modern.<sup>11</sup>

Secara teoritis, *civil society* dapat diartikan sebagai ruang di mana anggota masyarakat sebagai warga negara mempunyai akses sepenuhnya terhadap semua kegiatan publik. Cohen dan Arato (1992) mendefinisikan masyarakat sipil sebagai wilayah interaksi sosial yang di dalamnya mencakup semua kelompok sosial paling akrab (khususnya keluarga), asosiasi (terutama yang bersifat sukarela), gerakan kemasyarakatan, dan berbagai wadah komunikasi publik lainnya yang diciptakan melalui bentuk-bentuk pengaturan dan mobilisasi diri secara independen baik dalam hal kelembagaan maupun kegiatan. Perspektif lain dikemukakan oleh Gramsci (1971) yang mendefinisikan masyarakat sipil sebagai kumpulan



---

<sup>9</sup> Sebagai salah satu contoh, dapat terlihat semakin berperannya LSM dalam proses kebangkitan masyarakat di Indonesia, pasca runtuhnya sentralisasi. Kebangkitan dalam pengertian naiknya posisi tawar masyarakat di hadapan negara, khususnya pemerintah. Seperti WALHI, sebagai LSM yang bergerak di isu lingkungan, dan menempatkan isu lingkungan tersebut dalam konteks demokratisasi, dengan memainkan peran pengimbangan terhadap negara dengan cara konfliktual dan frontal. (Dikutip dari Tesis S2 Universitas Indonesia, Abdi Rahmat, Peran LSM dalam penguatan *Civil Society* di Indonesia)

<sup>10</sup> Bakaruddin Rosyidi Ahmad. 2011. Bahan Ajar Kebijakan Publik. Padang: Labor Ilmu Politik FISIP Unand.

<sup>11</sup> Civil society yang reflektif ini mengisyaratkan pentingnya wacana publik dan keberadaan ruang publik yang bebas, sehingga secara normatif individu-individu memiliki posisi setara dan dapat melakukan transaksi-transaksi wacana dan praksis politik tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran. Menggunakan pandangan filosofis Hanna Arendt dan Juergen Habermas. OpCit. Muhammad AS Hikam. 1996. Hal 86.

organisme privat, berbeda dengan negara yang disebutnya masyarakat politik (*political society*). Secara konkret, Gramsci menegaskan masyarakat sipil sebagai suatu wilayah institusi privat mencakup gereja, serikat-serikat dagang atau pekerja, dan lembaga pendidikan, sementara negara adalah institusi-institusi publik seperti pemerintah, pengadilan, polisi dan tentara.

Konsep masyarakat sipil yang melandasi studi ini pada hakikatnya merupakan konsep masyarakat yang mandiri atau otonom. Dalam batas-batas tertentu masyarakat sipil dilihat sebagai entitas yang mampu memajukan diri sendiri, bisa membatasi intervensi pemerintahan dan negara dalam realitas yang diciptakannya, serta senantiasa memperlihatkan sikap kritis dalam kehidupan politik. Pada kondisi tersebut, mereka memiliki hak melakukan kegiatan-kegiatan secara merdeka di dalamnya, termasuk melakukan penyampaian pendapat secara lisan atau tulisan. Ruang publik, secara institusional termasuk media massa, tempat-tempat pertemuan, dan sekolah-sekolah.<sup>12</sup>

Lebih lanjut, penelitian ini lebih mengkrucutkan kepada institusional *civil society* dalam melakukan gerakan advokasi terhadap sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan mengutip AS Hikam, secara institusional *civil society* bisa diartikan sebagai pengelompokan dari anggota-anggota masyarakat sebagai warga negara mandiri yang dapat dengan bebas dan egaliter bertindak aktif dalam wacana dan praksis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan pada umumnya, termasuk di dalamnya adalah jaringan-jaringan, pengelompokan sosial yang mencakup mulai dari rumah tangga, organisasi sukarela, sampai pada organisasi-organisasi yang pada awalnya mungkin dibentuk oleh negara, namun melayani kepentingan masyarakat.<sup>13</sup>

Institusional *civil society* bukan hanya mampu menjadi sumber arus ideologi politik yang pada gilirannya akan mempengaruhi budaya politik dan memungkinkan untuk menjadi

---

<sup>12</sup> J. Habermas. 1974. Dikutip oleh Muhammad AS Hikam. 1996. Hal 87.

<sup>13</sup> Muhammad AS. Hikam. 2008. Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan *Civil Society*. Jakarta: Erlangga. Hal: 132



sebuah modalitas yang mampu menampung tuntutan-tuntutan sosial-politik, diartikulasikan dan juga dilaksanakan. Pierre Bourdieu menegaskan sebuah gerakan sosial yang terinstitusikan merupakan suatu tindakan kolektif yang dipahami sebagai upaya melindungi, merekonstruksi unsur-unsur yang sakit dalam sistem sosial, dan menjadikan hal tersebut sebagai strategi untuk mempertahankan dominasi dan sarana untuk mengakumulasi jenis-jenis kapital lain.<sup>14</sup>

Sementara itu, pendirian satu negara yang modern dalam era pascakolonial, tidak terlepas dari peningkatan kekuasaan negara, seperti di Indonesia pada saat zaman Orde Baru, melalui akumulasi ekonomi dan juga hegemoni ideologi secara signifikan telah melemahkan proses-proses sosial dan politik *civil society*, dan dengan demikian juga menghambat partisipasi politik di tatanannya, khususnya di tingkat arus bawah. Kondisi ini memiliki suatu kemungkinan terjadinya konflik yang laten di antara dan dalam negara dan *civil society*. Konflik tersebut sejatinya adalah perwujudan dari sebuah gerakan mendobrak kebuntuan moralisme bebas nilai untuk dapat terlibat di arena politik, sehingga antara negara dan *civil society* tidak lagi ada ruang pemisah dan keduanya memiliki sebuah struktur yang sama (*check and balances*), dengan adanya perubahan pola relasi antara masyarakat dengan negara ini, merupakan sebuah perwujudan dari sebuah gerakan pro-demokrasi.<sup>15</sup>

Gerakan pro-demokrasi menjadi kajian yang menarik untuk diteliti, baik di tingkat peneliti internasional maupun nasional. Di Indonesia kajian tentang masyarakat sipil sudah banyak dilakukan, diantaranya: *Kyai dan Politik Dalam Wacana Civil Society* oleh Ali Maschan Moesa<sup>16</sup>, *Peran Masyarakat Sipil Dalam Proses Demokratisasi* oleh Otho H. Hadi<sup>17</sup>, *Islam, Muhammadiyah dan Advokasi Kemiskinan* oleh Zuly Qodir<sup>18</sup>. Namun, apa yang diteliti kebanyakan mereka terfokus kepada isu-isu nasional, dan tidak banyak

<sup>14</sup> Pierre Bourdieu dalam Haryatmoko. 2015. Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis. Yogyakarta: Boekoe Tjap Petroek. Hal: 29-39.

<sup>15</sup> *Ibid.* Hal 87

<sup>16</sup> Ali Maschan Moesa. 1999. *Kyai dan Politik Dalam Wacana Civil Society*. Surabaya: Lepkiss.

<sup>17</sup> Otho H. Hadi. 2010. Jurnal: Makara, Sosial Humaniora, Vol.14 No. 2 Desember. Depok: Departemen Sosiologi, FISIP Universitas Indonesia.

<sup>18</sup> Zuly Qodir. 2008. Jurnal: Laribas. MSI UII Vol. II, No. 1 Juli.

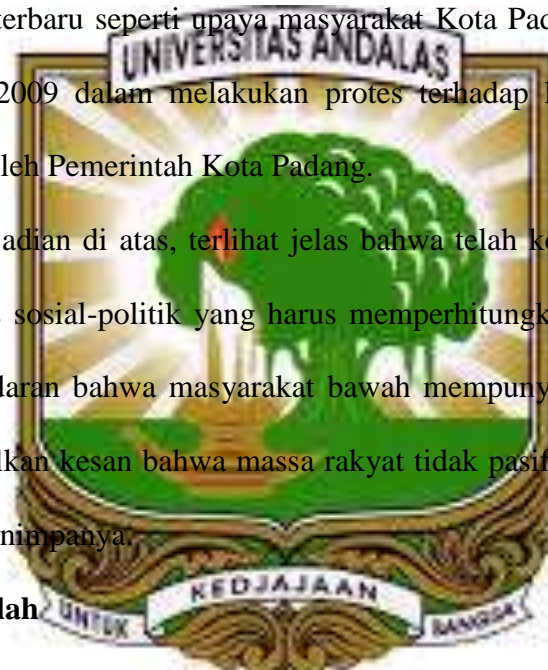
penelitian yang melihat proses advokasi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal, seperti gerakan masyarakat lokal dalam mengasosiasikan diri mereka secara politis pada entitas budaya berdasarkan hubungan agama, kesukuan, lokalisme, atau relasi-relasi komunitarian untuk memperjuangkan aspirasi.

Banyak aktivitas masyarakat sipil yang menyangkut isu lokal. Di Sumatera Barat contohnya, gerakan yang dilakukan oleh *civil society* sering dipicu oleh sebuah tuntutan atas perbaikan kesejahteraan ekonomi dan sosial, di antaranya: Gerakan Masyarakat Minang untuk Kembali ke Syariat pada abad ke-18, Gerakan Wahabi (1703-1792), Gerakan Padri pada abad ke-19, yang terbaru seperti upaya masyarakat Kota Padang yang menjadi korban bencana gempa tahun 2009 dalam melakukan protes terhadap kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan oleh Pemerintah Kota Padang.

Terlepas dari kejadian di atas, terlihat jelas bahwa telah kembalinya kesadaran akan pentingnya suatu proses sosial-politik yang harus memperhitungkan kekuatan akar rumput. Dengan kata lain, kesadaran bahwa masyarakat bawah mempunyai kekuatan politik dalam ruang publik, memunculkan kesan bahwa massa rakyat tidak pasif dan sangat peka terhadap segala kejadian yang menimpanya.

## 1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini menyorot kasus terkait strategi FMM dalam mengadvokasi kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Padang Nomor 650.44/Bappeda/II-2013 tentang persetujuan izin prinsip pemanfaatan ruang. Satu kasus yang menarik untuk diteliti di Kota Padang, adalah kasus penolakan masyarakat terhadap keberadaan investasi Lippo Group. Kasus ini merupakan wujud kebangkitan partisipasi masyarakat sipil di Sumatera Barat dalam usaha merubah kebijakan publik. Kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam pemberian izin investasi privat untuk Lippo Group ini dinilai tidak pro-rakyat, sehingga menuai aksi kontra



dari masyarakat sipil yang kuat. Aksi ini melibatkan kekuatan kaum agamawan, tokoh adat, dan organisasi mahasiswa.

Kasus ini bermula dari kebijakan Pemerintah Kota Padang yang memberikan izin investasi senilai Rp1,3 triliun kepada investor nasional Lippo Group di Jalan Khatib Sulaiman, untuk mendirikan Rumah Sakit (RS) Siloam dan Super Block Lippo Group (Lippo Plaza) di lokasi tersebut. Izin diberikan oleh walikota berupa kemudahan berinvestasi dan pembebasan pengurusan IMB.<sup>19</sup> Adanya izin dari walikota,<sup>20</sup> menjadi landasan selanjutnya bagi perusahaan untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Terbitnya IMB Lippo Plaza 0351/IMB/LL/LT 11/ PU (Padang Utara) 04/2013 tertanggal 3 Mei 2013 oleh Dinas Tata Ruang Tata Bangunan (TRTB), melanggengkan Lippo Group untuk menanamkan investasinya di Kota Padang, yakni dengan membangun Lippo Plaza yang di dalamnya terdapat hotel, rumah sakit, fasilitas pendidikan terdiri dari TK hingga SMA yang mampu menampung 1.680 siswa. Tidak hanya itu, Lippo Plaza juga dilengkapi dengan fasilitas pusat perdagangan menengah ke atas yang dibangun di atas lahan seluas 55.500 meter persegi. Bagi Pemko Padang, pusat perdagangan ini diharapkan menjadi tempat wisata belanja terlengkap di Kota Padang. Dalam perencanaan proyek ini terdapat beberapa calon penyewa antara lain Hypermart, Matahari Department Store, bioskop, fitness centre dan jasa perbankan, hotel berbintang lima, Hotel Arya Duta dengan 200 kamar.<sup>21</sup>

Izin yang dikeluarkan Wali Kota Padang tersebut, ternyata mendapat penolakan masyarakat yang tergabung kedalam Forum Masyarakat Minang (FMM). FMM terbentuk

---

<sup>19</sup>Harian Umum Haluan Padang, Sabtu, 11 Mei 2013, Lippo Bangun Mal, Hotel, RS dan Sekolah di Padang. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Padang, Dian Fakri mengatakan pembangunan Plaza Lippo, telah memenuhi persyaratan dalam pendirian bangunan, berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Peraturan wali kota (Perwako).

“Mall tersebut, telah memiliki IMB dan Perwako. Sehingga, tidak ada kendala lagi mereka untuk segera membangun mall tersebut,” kata Dian Fakri. Dimana nomor IMB Lippo Plaza 0351/IMB/LL/LT 11/ PU (Padang Utara) 04/2013 tertanggal 3 Mei 2013. Sedangkan, untuk Perwakonya, No, 50 A Tahun 2013 tertanggal 13 Maret 2013, tentang pembebasan pajak dan retribusi bagi investasi di atas Rp1 triliun.

<sup>20</sup>Serta diperkuat dengan adanya keputusan DPRD Kota Padang No. 26 tahun 2013 tanggal 12 November 2013 tentang Rekomendasi Investasi di Kota Padang Sindonews.com, Kamis 28 November 2013, PKS Tolak Pembangunan RS Siloam dan Lippo Superblock.

<sup>21</sup> *Ibid.*

dari tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) yang terdiri dari kalangan akademisi, kalangan kaum adat, kalangan tokoh agamawan dan mahasiswa. FMM didirikan oleh 13 (tiga belas) orang, bertempat di Sekretariat Mesjid Nurul Iman Padang sekaligus sebagai kantor FMM di kemudian hari.

FMM merupakan wadah lebih besar yang diisi oleh tokoh-tokoh masyarakat Sumbar yang memang sejak awal telah secara intensif mengamati dan mengkritisi kebijakan investasi berbentuk izin pendirian Siloam. FMM sendiri bertujuan melanjutkan pengadvokasian terhadap kebijakan investasi Lippo Group yang telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa komponen masyarakat. Dalam perjalanannya, FMM melakukan langkah-langkah strategi advokasi terhadap izin investasi untuk Lippo Group yang dituangkan pada izin fisik dari walikota serta diperkuat dengan adanya keputusan DPRD Kota Padang No.26 Tahun 2013 tanggal 12 November 2013 tentang Rekomendasi Investasi di Kota Padang.

Proses yang diupayakan oleh FMM ini berawal dari penggalangan dukungan, berupa aksi pengumpulan tanda tangan penolakan pembangunan RS Siloam tersebut pada Jum'at 24 Mei 2013, di Masjid At-taqwa PW Muhammadiyah Padang. Penolakan terbuka tersebut bermula datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar dan beberapa Ormas Islam yang memiliki faham radikalisme seperti Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM), Komite Penegak Islam (KPSI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hisbul Tahrir Islam (HTI), Gerakan Muslimin Minangkabau (GMM), dan Libas.<sup>22</sup>

Salah satu bentuk penolakan dari Ormas Sumbar yang tergabung ke dalam FMM, dengan lantang disuarakan salah satu tokohnya M. Sayuti Dt. Rajo Pangulu (Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau/LKAAM Sumbar) mengatakan, FMM menyatakan sikap menolak pembangunan RS Siloam di Kota Padang. Alasan penolak adalah kekhawatiran terkait dugaan adanya misi kristenisasi dalam proyek tersebut, mengingat *track record*

---

<sup>22</sup> Dokumen Rekomendasi FMM Sumbar, Tentang Pembentukan FMM.



pimpinan Lippo Group, James T. Riyadi yang selama ini punya agenda mengembangkan agama Kristen ke seluruh penjuru dunia, termasuk wilayah Sumbar yang menjadi salah satu targetnya.<sup>23</sup>

Berangkat dari fakta dan data yang telah dikumpulkan, FMM beranggapan bahwa pembangunan *super block* akan merusak nilai adat dan agama masyarakat Minangkabau yang mayoritas Islam, yang menunjung tinggi nilai Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK), dan akan menjadi permasalahan apabila dibiarkan kaum nasrani memasuki dan menguasai daerah Sumbar dikhawatirkan akan menodai adat dan agama orang Minang.<sup>24</sup>

Kekhawatiran FMM ini tampaknya cukup beralasan, karena sebelumnya di Sumbar juga pernah terjadi investasi dengan misi misionaris di Kota Bukittinggi pada tahun 1980-an dengan proyek pendirian RS Immanuel. RS ini berlokasi di dekat lapangan kantin Bukittinggi. Namun saat itu, para tokoh Sumbar seperti Buya Hamka dan Muzni M Yunus menentang proyek tersebut dan menemui Presiden Soeharto untuk mengalihkan proyek tersebut ke daerah lain.

Seperti halnya yang terjadi pada gerakan advokasi oleh FMM pada pendirian RS Siloam, penolakan ini merupakan bentuk kekhawatiran masyarakat akan adanya misi kristenisasi, mengingat latar belakang CEO Lippo Group James Riady selama ini aktif melakukan misionaris di berbagai daerah dan Negara. Bahkan masalah ini berkembang lebih

---

<sup>23</sup> Diskusi forum tersebut dilakukan di Kantor LKAAM Provinsi Sumbar. Dimana terdapat beberapa analisis data terkait James T Riyadi adalah penginjil dari aliran kristen radikal, yang terang-terangan hendak mengkristenkan desa-desa miskin di Indonesia. Selain itu James juga merupakan pengikut Kristen Avangelis yang melakukan tugas penginjilan untuk melakukan kristenisasi sebagaimana pernyataannya yang dimuat oleh majalah "The Asia Magz" edisi 17 Maret 2009 bahwa, dia akan membangun sekolah-sekolah (James T Riadi mempunyai grand design membangun 1.000 sekolah kristen di Indonesia) dan melakukan pemurtadan terhadap penduduk. Dan hal tersebut konsisten dilakukan melalui perusahaan-perusahaan yang ia jalankan walaupun pada mulanya ia masuk dengan janji-janji murni bisnis.

Hal itu, telah dibuktikan oleh Ormas Islam dan bahkan telah dilakukan investigasi terhadap informasi yang didapatkan. Janji murni bisnis tidak bertahan lama, seperti di Palembang yang hanya bertahan tiga tahun dan kemudian terjadi kebaktian massal di tengah lingkungan masyarakat di Palembang.

<sup>24</sup> Dokumen Keputusan Rapat FMM Tanggal 3 Juni 2013 di Lantai II Masjid Nurul Iman Padang.

jauh tidak hanya sebatas isu kristenisasi kepada masyarakat Minangkabau saja, bahkan kepada isu pelecehan simbol adat yang dilakukan oleh umat Kristen di Jakarta.<sup>25</sup>

Berkembangnya isu tersebut, disinyalir bertujuan untuk memperkuat fakta terkait upaya kristenisasi terhadap masyarakat Minangkabau yang notabenenya Muslim, termasuk kedalam rangka mencari dukungan yang lebih luas guna menolak rencana pembangunan Lippo Plaza (RS Siloam) di Kota Padang oleh FMM. Ringkasan penelitian tentang advokasi kebijakan Pemko Padang Nomor 650.44/Bappeda/II-2013 tentang persetujuan izin prinsip pemanfaatan ruang, disebutkan:

Pertama, gerakan advokasi FMM merupakan gerakan advokasi yang dianggap berhasil. Keberhasilan ini dilihat dari pergantian investor yang melakukan investasi di kawasan Khatib Sulaiman, yang semula dilakukan oleh Lippo Group berganti dengan PT. Surya Persada Lestari (SPL), selanjutnya substansi dari izin pendirian yang dikeluarkan oleh Pemko Padang, dimana Lippo Group berencana akan mendirikan empat bangunan berupa rumah sakit, sekolah, mall dan hotel lalu berubah menjadi dua bangunan saja yang akan didirikan yaitu mall dan hotel.

Kedua, lebih dari aspek subjektif peneliti terhadap ketidakpercayaan partai politik sebagai institusi perwakilan dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat. Dengan meneliti gerakan FMM, peneliti dapat memotret bentuk dari artikulasi kepentingan masyarakat yang disalurkan melalui kelompok kepentingan, dalam konteks penelitian ini adalah FMM. Ketiga, belum ada penelitian yang memfokuskan meneliti tentang kekuatan gerakan FMM untuk melakukan advokasi dan memberikan pengaruh politik kepada pemerintah dan investor untuk merubah substansi dari kebijakan. Kondisi ini memotivasi peneliti untuk meneliti dari kekuatan gerakan advokasi FMM.

---

<sup>25</sup>Isu pelecehan simbol adat Minangkabau oleh Pendeta Yanuardi Koto. Data didapat dari kumpulan wawancara awal peneliti dengan informan pada penelitian ini. Dokumen Keputusan Rapat FMM Tanggal 3 Juni 2013.

Peneliti ingin menggali dan menganalisa aksi-aksi yang terjadi pasca-kebijakan diimplementasikan, seperti apa dimensi kekuatan yang dimiliki *civil society* dalam advokasinya?, yang mana menurut peneliti sangat jarang diteliti oleh peneliti lain. Dari uraian latar belakang di atas dirumuskan pertanyaan penelitian yang sekaligus rumusan masalah, sebagai berikut: Apa yang menyebabkan FMM mampu membuat pemerintah Kota Padang dan Lippo Group merubah (memodifikasi) kebijakan izin investasi yang dikeluarkan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Umum**

Untuk mendeskripsikan proses dan penyebab FMM mampu mempengaruhi Pemerintah Kota Padang dan Lippo terkait dengan izin Lippo mendirikan Super Block di Jalan Khatib Sulaiman.

#### **1.3.2. Tujuan Khusus**

- 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisa strategi advokasi yang di gunakan oleh FMM untuk mempengaruhi Pemko Padang dan Lippo Group melakukan perubahan substansi dari izin pendirian Lippo Plaza.
- 2) Mengidentifikasi unsur-unsur dari kekuatan gerakan FMM sebagai gerakan *civil society* yang mampu melakukan advokasinya dalam mempengaruhi Pemerintah Kota Padang dengan merubah substansi kebijakan investasi oleh Lippo Group.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Aplikatif**

- 1) Dapat mengetahui permasalahan dalam Implementasi Kebijakan Pemko Padang terkait Izin Pendirian Lippo Plaza.



- 2) Dapat mengetahui langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh *civil society* dalam melakukan advokasi untuk merubah kebijakan Pemerintah.
- 3) Dapat menjadi bahan masukan dalam menyusun kebijakan bagi Pemko untuk menetapkan dan mengeluarkan Izin Pendirian Bangunan.

#### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

- 1) Sebagai bahan sumbangan referensi literatur di dunia akademisi dalam menganalisis kebijakan pemerintah.
- 2) Melengkapi pengetahuan tentang proses advokasi dalam masyarakat lokal yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil.

#### **1.4.3 Manfaat Metodologis**

Sebagai bahan referensi metodologi dalam menganalisis implementasi kebijakan.

